

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

LSM atau yang sering kita ketahui sebagai singkatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat adalah suatu bentuk perkumpulan masyarakat yang bertujuan untuk beraliansi membangun suatu tujuan terkait isu-isu tertentu di pemerintah. LSM ini juga sering disebut sebagai control power dalam suatu pemerintahan dan berperan sebagai pihak pengawas pemerintah agar suatu sistem pemerintah itu berjalan dengan baik. Landasan utama yang perlu diperkuat dan diperdalam untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Peran Ormas dan LSM dalam konteks pembangunan berkelanjutan tidak boleh diabaikan. Ormas dan LSM merupakan komponen penting dalam ekosistem pembangunan berkelanjutan di Indonesia karena mereka memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai agen perubahan yang dapat membantu mencapai berbagai tujuan pembangunan. Ini merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi pada pencapaian tujuan ini. Ormas dan LSM memiliki kemampuan khusus untuk memobilisasi sumber daya manusia dan mendekatkan pembangunan kepada masyarakat yang membutuhkan (Rahman et al., 2023)

Lsm atau ormas ini di era politik modern sangat berperan penting dalam membangun dan mengawasi sistem pemerintahan di suatu negara. Maka LSM ini sering terlibat langsung dalam alur berjalan nya pemerintahan di era modern ini sering di anggap sebagai control power bagi pemerintahan dan berperan sebagai pengawasan di luar struktur negara atau di sebut sebagai aktor non negara. Menurut(Yusuf, 2021) Sebagai bagian dari pemerintahan, LSM merupakan pilar penting dalam pembangunan. Sebagai institusi yang dipercaya untuk menyalurkan bantuan pembangunan, LSM dianggap lebih independen, memiliki kredibilitas yang tinggi, lebih responsif, dan lebih fleksibel dibandingkan dengan penyediaan bantuan melalui pemerintah, yang

dianggap sangat birokratis dan kurang responsif. Maka dari itu LSM di anggap salah satu faktor penting dalam berlangsung nya kemaslahatan pemerintah di era politik modern saat ini untuk menjalankan peran sebagai pengawasan di luar struktual resmi negara atau yang di sebut Aktor-non negara.

Lsm atau ormas ini biasa melakukan tindakan terhadap suatu isu atau kebijakan pemerintah yang di rasa ada nya kesalahah pahaman atau tidak mewakili kepentingan rakyat LSM ini sering melakukan strategi advokasi atau melakukan gerakan seperti demonstrasi kepada pemerintah yang ada di daerah maupun tingkatan pusat. Menurut (Alfianto et al., 2025) LSM bertindak sebagai aktor masyarakat sipil untuk menunjukkan bahwa kekuasaan negara tidak berdiri sendiri dalam tata kelola pemerintahan modern; organisasi non-negara yang berkomitmen untuk transparansi, akuntabilitas, dan memperluas ruang demokrasi mengawasi, mengkritik, dan melengkapinya. Dalam hal ini ormas atau LSM sering kali juga terlibat secara langsung dalam bidang pengawasan atau memberi masukan dalam suatu kebijakan publik yang berlangsung di pemerintahan.

Peran lsm ini juga di anggap penting di era politik modern ini sebagai salah satu pilar penting juga dalam bidang advokasi dan pengawasan di pemerintah karena memang LSM ini berangkat dari pada masyarakat yang memiliki rasa kepekaan tinggi terhadap isu-isu kebijakan atau isu-isu kasus kepada para pemangku kebijakan yang memang melanggar dari norma hukum yang berku pada Undang-Undang Dasar 1945. Menurut (Wulandari & Shafarani, 2023) Peran penting yang dimainkan oleh masyarakat sipil dalam pengawasan publik terhadap birokrasi dapat dicapai dengan berbagai cara dan telah terbukti menguntungkan. Pertama, masyarakat sipil memiliki kemampuan untuk memantau dan menganalisis kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan warga negara dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu lsm dan juga ormas sering kali melakukan berupa gerakan-gerakan aksi sebagai salah satu ekspresi mereka ketika memang adanya pelanggaran atau tidak kesesuaian kebijakan atau dalam diri aktor pejabat nya itu sendiri.

Peran LSM sebagai aktor- non negara atau aktor yang diluar di dalam sistem pemerintahan yang resmi negara yang di atur dalam UUD 1945 ini juga memiliki ke istimewa tugas dalam ke ikut sertaan nya dalam meng intervensi kebijakan yang di pangku oleh aktor negara di dalam sistem pemerintahan yang resmi. Dalam hal ini, proses politik juga harus mempertimbangkan peran organisasi sebagai aktor non- negara dalam membangun gerakan sosial. Dengan adanya perkumpulan organisasi, orang dapat bergabung dalam gerakan kolektif, yang memungkinkan kebebasan psikologis dan tindakan inklusif. Persepsi publik tentang peluang untuk mencapai sesuatu disebut sebagai psikologis, dan semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam gerakan, semakin besar peluang untuk mencapai sesuatu (Tegar Alfian, Fauzi Nur, Yudha Teza, 2025)

Maka dari itu tugas dan adanya LSM ini sebagai wujud dari keberlangsungan sistem pemerintahan yang sehat dimana masyarakat sipil memiliki hak untuk mengawasi secara langsung terhadap segala sesuatu isu yang ada di dalam sistem pemerintahan. LSM adalah salah satu pilar good governance. LSM sering bekerja untuk mendukung keadilan dan ekonomi serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar dan negara. Di berbagai negara, LSM berperan penting sebagai kolaborator pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang layak kepada masyarakat yang membutuhkan seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya. LSM di Indonesia berkembang dengan cepat, dan berbagai masalah yang diangkat juga berkembang. LSM di Indonesia ada karena globalisasi, dengan salah satu aspek utamanya adalah globalisasi melalui NGO internasional yang memberikan bantuan dan program ke seluruh dunia (Yusuf, 2021)

Termasuk dalam penelitian ini juga membahas tentang salah satu LSM yang memang bergerak dan berfokus pada suatu isu anti korupsi yang bernama GMASI (Gerakan Masyarakat Anti Korupsi). LSM ini sudah lama berdiri sejak tahun 2017 di bentuk di Bandung tepat nya di kec Ujung Berung. Berangkat dari keresahan marak nya kasus korupsi di Indonesia termasuk di

tempat lokus penelitian ini yaitu di kota bandung sering beberapa taun terakhir isu korupsi ini menjadi salah satu isu yang paling kencang dan banyak di bicarakan oleh masyarakat luas. Secara resmi, Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) Kota Bandung melaporkan bahwa 126 kasus pidana korupsi masuk dan 110 diputuskan pada sejak tahun 2019. Angkaangka ini menunjukkan bahwa korupsi di tingkat lokal terjadi secara teratur dan bukan hanya masalah normatif. Jumlah masalah yang dilaporkan oleh BPS menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan Kota Bandung masih menghadapi masalah besar terkait kejujuran, transparansi, dan pengawasan publik. Akibatnya, situasi ini menunjukkan betapa pentingnya kehadiran aktor non-negara seperti LSM sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial dan pengawasan kekuasaan pemerintah daerah.

**Tabel 1.1 Data Korupsi Kota Bandung**

| Jumlah Gugatan Perkara Pidana Korupsi Di Kota Bandung 2019 |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Number Of corruption crime In Bandung Municipality, 2019   |        |
| Kategori                                                   | Jumlah |
| Sisa Tahun 2017                                            | 63     |
| Sisa Tahun 2018                                            | 65     |
| Masuk tahun 2019                                           | 126    |
| Putus Tahun 2019                                           | 110    |
| Sisa Tahun 2019                                            | 68     |

Sumber : pengadilan negeri kela 1A khusus Bandung

Adapun memang data lain nya terkait kasus yang terbaru pada kasus pidana korupsi yang menimpa wakil walikota bandung yaitu H.Erwin terkait kasus penyalah gunaan kekuasaan. Dalam kasus ini Wakil Walikota Bandung ini tidak sendirian ia di tangkap bersama dengan salah satu anggota DPRD Kota Bandung yaitu Rendiana Awangga. Dalam kasus ini di sinyalir ada praktik penyalah gunaan kekuasaan yaitu pengadaan jasa pekerjaan kepada pejabat di lingkungan OPD Pemerintah Kota Bandung.

Sehingg KPK menjerat kedua tersangka ini disangkakan melanggar Pasal 12 huruf E subsider Pasal 15 Juncto Pasal 12 huruf E UU Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

**Gambar 1.1**



Sumber gambar : @infobdgbaratcimahi

LSM GMASI pun beberapa kali melakukan pengawasan terkait tentang pengelolaan anggaran di wilayah lingkungan pemerintahan kota bandung khususnya. Karna memang GMASI ini berfokus pada aspek bidang keuangan agar lebih transparansi dan mencegah tindak pidana korupsi maka LSM GMASI ini sering melakukan audiensi dengan beberapa dinas terkait tentang pengelolaan anggaran dan pengawasan anggaran di pemerintahan kota bandung. Termasuk memang LSM GMASI ini juga ikut melakukan pengawasan sidang pada salah satu kasus korupsi yang menimpa Wali Kota Bandung Kang Yana Mulyana pada kasus korupsi yang berkaitan dengan *Smart City*. Dapat dilihat dari peran LSM GMASI ini terkait tentang keterlibatan nya langsung dalam bidang pengawasan kasus korupsi GMASI ini cukup aktif dalam melakukan gerakan pengawasan atau secara langsung turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi pada pemerintah Kota Bandung.

Dalam penelitian ini pun untuk memperkuat kajian penelitian ini penulis menggunakan 3 teori yaitu teori *civil society* dari Alexis de Tocqueville, teori *good governance* dari Rhodes, dan juga teori social movement dari Charles Tilly. Karena dalam penelitian "Peran LSM sebagai Aktor Non-Negara dalam Gerakan Anti-Korupsi: Studi Kasus LSM GMASI di Kota Bandung", tiga landasan teori digunakan: Teori Masyarakat Sipil, Teori Pemerintahan, dan Teori Gerakan Sosial. Landasan-landasan ini dipilih karena menawarkan kerangka konseptual yang komprehensif dan saling melengkapi untuk memahami posisi strategis dan dinamika peran LSM dalam ruang publik.

Teori *civil society* Alexis de Tocqueville (1835) (Woldring, 1998) menekankan bahwa partisipasi aktif warga dan asosiasi sukarela sangat penting untuk stabilitas demokrasi. Tocqueville melihat masyarakat sipil sebagai tempat di luar negara di mana orang dapat berinteraksi, berkolaborasi, dan mengorganisasikan kepentingan bersama tanpa bergantung pada pemerintah negara. Studi ini melihat LSM GMASI sebagai bagian dari masyarakat sipil yang memiliki peran strategis dalam mengawasi pemerintah Kota Bandung. LSM ini melakukan tugas yang sejalan dengan gagasan Tocqueville: menciptakan mekanisme kontrol sosial terhadap praktik korupsi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan melalui advokasi, pengawasan, dan edukasi publik.

Teori elite yang dikemukakan oleh Gaetano Mosca, yang menjelaskan bahwa dalam setiap organisasi selalu terdapat sekelompok kecil individu yang memiliki peran dominan dalam proses kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Kelompok elite memiliki kemampuan untuk mengorganisasi anggota, menentukan kebijakan organisasi, serta membangun koordinasi yang memungkinkan organisasi menjalankan fungsinya secara efektif. Mosca menegaskan bahwa keunggulan elite bukan hanya terletak pada kedudukan formal yang dimiliki, melainkan juga pada kemampuan membangun jaringan, pengalaman, pengetahuan, dan kapasitas kepemimpinan yang membedakan mereka dari anggota lainnya. Dengan demikian, elite menjadi elemen penting

yang menentukan arah, keberlanjutan, dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan..

*Charles Tilly* (2004) mendefinisikan gerakan sosial sebagai aksi kolektif yang direncanakan untuk menekan, mempengaruhi, atau mengubah kebijakan dan praktik kekuasaan. Tilly menekankan ide *repertoires of contention*, yaitu berbagai strategi dan taktik yang digunakan kelompok untuk mencapai tujuan politik atau sosial, seperti demonstrasi, advokasi, kampanye publik, dan tekanan terhadap pemerintah. Studi ini mempertimbangkan LSM GMASI sebagai komponen gerakan sosial anti-korupsi di Kota Bandung. GMASI melakukan tugasnya yang sejalan dengan gagasan Tilly, yaitu meningkatkan proses pengambilan keputusan dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah melalui aksi kolektif seperti advokasi, kampanye kesadaran publik, pengawasan praktik pemerintahan, dan pelaporan kasus korupsi.

Dalam penelitian ini peneliti mencari pembandingan dari penelitian yang akan di lakukan seperti yang di lakukan oleh (\*Apriadi, Made Agung Dwijatenaya Ida Bagus Made 2022) yang berjudul "Strategi Lembaga Swadaya Masyarakat Anti Korupsi dalam Menunjang Good Governance di Kutai Kartanegara" mempelajari bagaimana LSM anti-korupsi memainkan peran penting dalam mendorong penerapan prinsip governance yang baik di tingkat daerah. Fokus penelitian ini adalah metode yang digunakan LSM untuk mengawasi kebijakan pemerintah daerah, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Studi menunjukkan bahwa LSM anti-korupsi adalah mitra penting pemerintah, melakukan tugas kontrol sosial melalui mendukung kebijakan, melaporkan dugaan penyimpangan, dan memberi tahu masyarakat tentang praktik pemerintahan yang bersih. Menurut penelitian ini, LSM dapat membantu memperkuat tata kelola pemerintahan daerah jika mereka mampu membangun hubungan yang baik dengan pemerintah.



Penelitian ini telah memberikan gambaran penting tentang cara LSM antikorupsi membantu pemerintahan yang baik, tetapi masih ada beberapa masalah yang belum diselesaikan. Pertama, penelitian tersebut belum mempelajari peran LSM sebagai aktor non-negara dalam dinamika kekuasaan politik lokal karena lebih fokus pada aspek administratif dan tata kelola pemerintahan. Kedua, penelitian ini belum memeriksa bagaimana LSM melakukan mobilisasi masyarakat, membangun jaringan sosial, dan menggunakan aksi kolektif sebagai alat tekanan politik terhadap pemerintah daerah. Dengan kata lain, dimensi gerakan sosial dan relasi kekuasaan antara LSM dan pemerintah tidak menjadi fokus utama penelitian ini. Ketiga, penelitian tersebut tidak mempelajari satu organisasi secara menyeluruh sebagai studi kasus analitis. Akibatnya, penelitian tersebut tidak dapat menjelaskan secara menyeluruh praktik, strategi, dan masalah yang dihadapi LSM lokal.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dalam hal ini peneliti menentukan dua rumusan masalah yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian yang ini ialah :

1. Bagaimana peran LSM GMASI dalam gerakan anti korupsi sebagai aktor non- negara ?
2. Bagaimana hubungan dengan pemerintah kota bandung ?
3. Strategi apa yang di lakukan oleh LSM GMASI dalam gerakan anti korupsi ini ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengetahui peran dari lsm gmasi sebagai aktor non-negara dalam gerakan anti korupsi
2. Mengetahui hubungan pemerintah kota bandung
3. Mengetahui strategi yang di lakukan LSM GMASI dalam melakukan gerakan anti korupsi



## **D. MANFAAT HASIL PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan penelitian ilmu politik, terutama dalam hal mempelajari aktor non-negara dan masyarakat sipil dalam konteks pemerintahan daerah. Studi ini meningkatkan pemahaman kita tentang peran LSM sebagai bagian dari masyarakat sipil, di mana mereka bertindak sebagai normatif dan aktor politik dalam pengawasan kekuasaan dan pencegahan korupsi. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan teori civil society, Good Governance, dan gerakan sosial untuk menjelaskan dinamika peran LSM dalam tata kelola pemerintahan lokal. Ini akan menjadi referensi akademik untuk penelitian terkait dengan topik ini di masa mendatang.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan gambaran praktis tentang peran dan taktik LSM GEMASI dalam gerakan antikorupsi di Kota Bandung. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk evaluasi dan refleksi pemerintah daerah tentang bagaimana membangun hubungan yang lebih terbuka dan terlibat dengan masyarakat sipil. Selain itu, temuan ini juga dapat menjadi rujukan bagi LSM dan organisasi masyarakat lainnya untuk memperkuat advokasi, pengawasan kebijakan, dan mobilisasi masyarakat untuk mencegah korupsi di tingkat lokal.

## **E. Tempat Penelitian**

Penelitian ini akan di lakukan pada dua tempat dan dua narasumber yaitu pada ketua LSM GMASI di kantor DPC nya yang terletak di kec Ujung Berung dan yang kedua pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (KESBANGPOL) Kota Bandung sebagai Badan Pemerintah yang menangani LSM atau Ormas di Kota Bandung.

## **F. Kerangka Berpikir**

Penelitian ini berangkat dari keyakinan bahwa korupsi adalah masalah tata kelola pemerintahan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan peran negara. Keterlibatan aktor non-negara, terutama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), menjadi penting dalam demokrasi lokal sebagai bagian dari mekanisme kontrol dan pengawasan kekuasaan.

Menurut teori masyarakat sipil Alexis de Tocqueville, LSM dianggap sebagai kelompok sukarela masyarakat yang berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan negara. LSM menunjukkan partisipasi warga dalam kehidupan publik dan menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengartikulasikan kepentingan mereka dan melihat bagaimana pemerintahan berjalan. Studi ini menempatkan LSM GMASI sebagai bagian masyarakat sipil yang melakukan kontrol sosial terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung.

Penelitian ini juga menggunakan teori Gerakan Sosial Charles Tilly untuk memahami bagaimana peran tersebut dimainkan. Teori ini menekankan bahwa gerakan sosial diwujudkan melalui aksi kolektif, strategi advokasi, dan repertoires of contention terhadap pemegang kekuasaan. Dalam konteks ini, aktivitas GMASI seperti advokasi kebijakan, kampanye publik, dan pengawasan pemerintahan dianggap sebagai bagian dari gerakan sosial.

Teori Elite digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kepemimpinan dalam LSM GMASI memengaruhi pelaksanaan gerakan anti-korupsi di Kota Bandung. Menurut Gaetano Mosca, setiap organisasi akan selalu memiliki sekelompok kecil individu atau elite yang berperan dalam mengarahkan organisasi, mengambil keputusan strategis, mengoordinasikan anggota, serta menentukan tujuan yang ingin dicapai. Keberadaan elite menjadi unsur penting karena memiliki kemampuan untuk mengorganisasi sumber daya, membangun jaringan, serta menentukan arah kebijakan organisasi agar dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan ketiga landasan teoritis tersebut, kerangka berpikir penelitian ini berfokus pada peran LSM GMASI sebagai aktor non-negara dalam gerakan anti-korupsi Kota Bandung dan peranannya dalam mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang lebih bersih dan akuntabel.

**Tabel 1.2 Kerangka Berpikir**

